

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KONSTITUSIONAL

**Amanat Pendiri Bangsa:
Kebijakan Pembangunan Berbasis
Satu Data Indonesia**

Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum

Duta Arsip Nasional Republik Indonesia &
Dewan Pembina Majelis Transformasi Desa ICMI Pusat

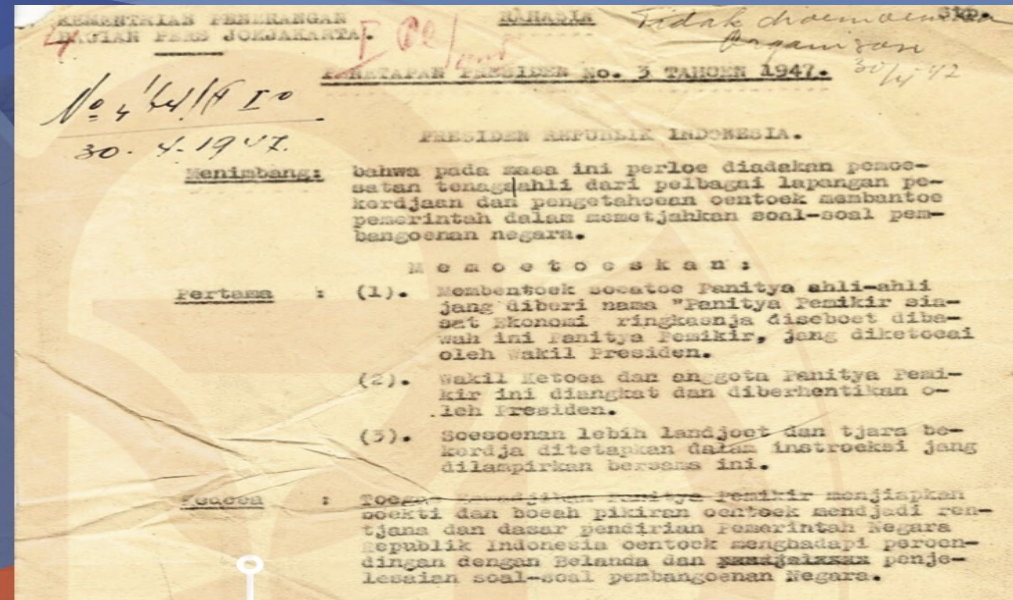
Dari sebuah ketetapan presiden yang lahir di masa genting, cita-cita perencanaan mulai dirumuskan.

Meski usia republik masih belia dan pertempuran belum usai, semangat untuk menata masa depan tidak pernah padam.

Pada Januari 1947, Badan Perancang Ekonomi di Jawa-Madura dan Sumatera dibentuk.

Badan ini disempurnakan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE). Inilah bara pertama yang menyalakan api perencanaan nasional.

(ANRI, Arsip Foto Personalia P04/163)



Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1947 tentang Pembentukan Panitia Ahli-Ahli yang Diberi Nama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang Diketaui Wakil Presiden.

PPSE didirikan untuk membantu pemerintah dalam memecahkan soal pembangunan negara, menyiapkan bukti dan buah pikir untuk menjadi rencana dan dasar pendirian Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menghadapi perundingan dengan Belanda.

(ANRI, Arsip Tekstual Kementerian Penerangan 1945-1950 No. 8)

Pada era **Kabinet Sukiman**, tibalah masa dimana bara itu kembali menyala. Melalui surat dari Mr. A.W. Soerjoadingrat selaku Sekretaris Dewan Menteri, beliau menyampaikan sebuah **Rancangan Undang-Undang Dewan Perancang Negara** yang disusun oleh **Dr. Sumitro Djojohadikusumo**, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dengan mempertimbangkan arahan dari Kabinet Natsir.



Dr. Sumitro Djojohadikusumo
(Penyusun Rancangan Undang-Undang Dewan Perancang Negara).

(ANRI, Arsip Foto Personalia P06/488)

Surat tertanggal 29 Mei 1951 dari Sekretaris Dewan Menteri mengenai **Dewan Perantjang Negara** ini dikirimkan kepada para menteri dan tembusan kepada Presiden, Wakil Presiden, Direktur Kabinet Presiden, Sekretaris Perdana Menteri, dan para Sekretaris Jenderal Kementerian.

(ANRI, Arsip Tekstual Sekretariat Negara :
Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1277)



KABINET PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA

2 JUN 1951
RAHASIA / SEGERA

No. 9150/51

Djakarta, 29 Mei 1951.-

Lamp.: 1 (satu)

Hal : Dewan Perantjang Negara.-

Kepada
Para Menteri
di
Djakarta.-

Didalam Keterangan Pemerintah yang diujapkan di muka Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Mei 1951 Perdana Menteri antara lain mengutarakan, bahwa Kabinet sekarang bermaksud membentuk suatu Dewan Perantjang Negara yang pembentukannya sudah ditjita-tjikan juga oleh Kabinet Natsir dahulu.

Berhubung dengan itu, maka bersama ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan sebuah Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Dewan Perantjang Negara yang disusun oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Dr. Sumitro Djojohadikusumo dengan mengingat petunjuk-petunjuk dari Kabinet Natsir.-

Tembusan surat ini disampaikan kepada :

1. Presiden,
2. Wakil Presiden,
3. Direktur Kabinet Presiden,
4. Sekretaris Perdana Menteri,
5. Para Sekretaris Djenderal Kementerian, untuk diketahui.-

SEKRETARIS DEWAN MENTERI,

(Signature)
(Mr. A.W. Soerjoadingrat)

7 Prinsip Pola Pembangunan Semesta Berencana

1. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
2. Desentralisasi perspektif NKRI;
3. Demokrasi ekonomi pancasila;
4. Politik luar negeri bebas aktif dan defensif aktif (termasuk dalam kerja sama riset dengan negara lain);
5. *Evidence based policy*;
6. Pemberdayaan desa/kelurahan dalam *democratic rural development*;
7. Industrialisasi dengan menekankan pentingnya menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional, kearifan lokal, serta sumber daya alam hayati dan nir-hayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

Dewan Perancang Nasional

513 Anggota MPRS, 600 Pakar

Pembangunan Nasional Semesta Berencana dirancang oleh Depernas, yang beranggotakan perwakilan dari Tanah Air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke (MPRS dan Departemen Penerangan, 1961; 158). Depernas bertugas:

- a. menyusun rencana pembangunan nasional dengan memperhitungkan penggunaan segala kekayaan alam dan pengerahan tenaga rakyat, serta meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dalam bentuk rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan.
- b. Naskah tersebut semula terdiri atas 5.100 halaman, setelah dicetak dalam buku menjadi 4.647 halaman.

“

*Depernas tidak dapat bekerja atas angka-angka yang
berlainan itu. Depernas menginsyafi bahwa soal penduduk
adalah soal pokok dalam perencanaan, karena penduduklah
yang menjadi tujuan pembangunan dan penduduk pulalah
yang menjadi pelaksana pembangunan. Keterangan-
keterangan yang tepat mengenai jumlah penduduk adalah
satu keharusan dalam setiap penyusunan rencana dan dalam
pelaksanaan dan penilaian pembangunan.*

”

– Depernas, 1 Januari 1961 –

IV. POLA PROJEK BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/PERTAHANAN

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama proyek	Tempat	Biaya rupiah (jutaan)	Biaya deviasi rupiah (jutaan)	Djumlah biaya rupiah (jutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AE. 80	1	Transmigrasi	Seluruh Indonesia	1.000	—	1.000	Memindahkan sekurang-kurangnya 250.000 transmigran untuk sektor pertanian keluar Djawa.	Dikerdjakan mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai akhir Rentjana I.
AE. 81	2	Depernas	Djakarta Bandung	100	—	100	Gedung Depernas dan Lembaga-lembaganya.	Dikerdjakan mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai akhir Rentjana I.
AE. 82	3	Koperasi	Seluruh Indonesia	500	—	500	Memperkembangkan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpinpin, khusus dalam bidang distribusi dan kemudian dalam bidang produksi.	Dikerdjakan mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai akhir tahun ketiga Rentjana I.
AE. 83	4	Pendjara modern	1. Djawa Barat 2. Djawa Tengah 3. Sumatra 4. Kalimantan 5. Sulawesi 6. Nusa Tenggara 7. Maluku	26	—	26	7 buah pendjara modern diperlengkapi dengan tempat-tempat pertanian, pertununan, perkajuan, perkulitan dan lain-lain.	Dikerdjakan mulai tahun kedua Rentjana I dan selesai akhir tahun ketiga Rentjana I.
AE. 84	5	Polisi	Seluruh Indonesia	2.000	—	2.000	Perbaikan perlengkapan dan mempertinggi mutu kepolisian negara.	Dikerdjakan mulai tahun pertama Rentjana I sampai akhir Rentjana I.
AE. 85	6	Lembaga Pembina Hukum Nasional		6	—	6	Perundang-undangan Nasional.	Dimulai tahun pertama Rentjana I. selesai akhir tahun ketiga. Untuk honorarium tenaga-tenaga ahli Lembaga, disediakan biaya setjukupnja.
DJUMLAH:				3.632	—	3.632		

Pembangunan Masyarakat Desa

TJADANGAN:

- 1 Lembaga Administrasi Negara
- 2 Peradilan Kanak-kanak
- 3 Arsip Nasional

Termasuk bidang Keuangan.

Djenis usaha		Daswati I																					
		Atjeh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Riau	Djambi	Djakarta Raya	Jawa Barat	Jawa Tengah	D.I. Jogjakarta	Jawa Timur	Kal. Barat	Kal. Selatan	Kal. Timur	Kal. Tengah	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Utara	Sulawesi Selatan	Maluku	Irian Barat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
33.	Lembaga Geologi/Pertambangan	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	„ Metalurgi	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	„ Elektronika	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	Penelitian dibidang Geologi/Pertambangan	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	Aerial Survey	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	Penelitian dibidang Industri	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.	Penelitian dibidang Produksi Pangan	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	Penelitian dibidang Perkebunan dan Kehutanan	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	Penelitian dilapangan ekonomi dan kemasjarakatan	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Kesedjahteraan.																							
42.	Rumah Sakit Umum ketjil	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43.	Poliklinik	—	×	—	—	—	×	Seluruh	Indonesia	—	—	—	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—
44.	Rumah Sakit Umum Pusat	—	×	—	—	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	×	×	—	
45.	Perumahan	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.	Perluasan kota	—	—	×	—	—	×	Seluruh	Indonesia	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—
47.	Air minum	—	—	×	—	—	×	—	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	—	×	—	—	
48.	Kesedjahteraan Sosial (Rehabilitasi Penderita tjtjat)	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49.	Lembaga Sosial Desa (termasuk penerangan dan lain-lain)	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50.	Kesedjahteraan Tani dan Nelayan	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Pemerintahan.																							
51.	Transmigrasi	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.	Koperasi	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53.	Pendjara Modern	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54.	Pembangunan Masjarakat Desa	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55.	Polisi	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Pembangunan khusus.																							
56.	Projek khusus	—	—	—	—	—	—	Seluruh	Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Produksi.																							
Industri:																							
57.	Industri Kimia Pupuk	—	×	—	×	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58.	Industri Kimia lainnya	—	×	—	×	—	×	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59.	Tenaga Listrik	—	×	—	×	—	×	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60.	Kilang Minyak	—	×	—	×	—	×	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61.	Batu Bara	—	×	—	×	—	×	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



tujuh
bahan
pokok

indoktrinasi

1961/1962

disusun oleh
perwakilan masyarakat
Indonesian people

LAMPIRAN
KETetapan M.P.R.S. No.: II/MPRS/1960

GARIS-GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL-SEMESTA-BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 - 1962

BUKU KE-DUA
RANTJANGAN BIDANG POKOK
PROJEK PEMBANGUNAN

DJILID IV
POLA PENJELASAN
BIDANG KEMASJARAKATAN



Ringkasan Ketetapan
Majelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara — Republik Indonesia

No. I dan II/MPRS/1960

M. P. R. S. dan DEPARTEMEN PERANGKAT

LAMPIRAN
KETETAPAN M.P.R.S. NO. : 11/MPRS/1960
GARIS – GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL – SEMESTA BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969

BUKU KE – SATU
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN
NASIONAL-SEMESTA-BERENTJANA

DJILID I
PENDAHULUAN

LAMPIRAN
KETETAPAN M.P.R.S. NO. : 11/MPRS/1960
GARIS – GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL – SEMESTA BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969

BUKU KE – SATU
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN
NASIONAL-SEMESTA-BERENTJANA

DJILID II
SOSIALISME INDONESIA
TRIPOLA PEMANGUNAN
POLA PROJEK

LAMPIRAN
KETETAPAN M.P.R.S. NO. : 11/MPRS/1960
GARIS – GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL – SEMESTA BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969

BUKU KE – TIGA
BIDANG MENTAL/RUHANI
DAN PENELITIAN

DJILID V
POLA PENJELASAN
BIDANG KEBUDAJAAN
DAN PENDIDIKAN

LAMPIRAN
KETETAPAN M.P.R.S. NO. : 11/MPRS/1960
GARIS – GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL – SEMESTA BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969

BUKU KE – TIGA
BIDANG MENTAL/RUHANI
DAN PENELITIAN

DJILID VI
POLA PENJELASAN
BIDANG PENDIDIKAN

LAMPIRAN
KETETAPAN M.P.R.S. NO. : 11/MPRS/1960
GARIS – GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL – SEMESTA BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969

BUKU KE – TIGA
BIDANG MENTAL/RUHANI
DAN PENELITIAN

DJILID VII
POLA PENJELASAN
BIDANG PENDIDIKAN
TENAGA PEMBANGUNAN

LAMPIRAN
KETETAPAN M.P.R.S. NO. : 11/MPRS/1960
GARIS – GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL – SEMESTA BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969

BUKU KE – TIGA
BIDANG MENTAL/RUHANI
DAN PENELITIAN

DJILID VIII
POLA PENJELASAN
BIDANG PENELITIAN

LAMPIRAN
KETETAPAN M.P.R.S. NO. : 11/MPRS/1960
GARIS – GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL – SEMESTA BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969

BUKU KE – TIGA
BIDANG MENTAL/RUHANI
DAN PENELITIAN

DJILID IX
POLA PENJELASAN
BIDANG PENELITIAN

LAMPIRAN
KETETAPAN M.P.R.S. NO. : 11/MPRS/1960
GARIS – GARIS BESAR
POLA PEMBANGUNAN
NASIONAL – SEMESTA BERENTJANA
TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969

BUKU KE – TIGA
BIDANG MENTAL/RUHANI
DAN PENELITIAN

DJILID X
POLA PENJELASAN
BIDANG PENELITIAN



National
Committee
of Indonesia

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Sebagai

Ketua Komite Nasional Memory of The World Indonesia

Menetapkan

*Arsip Dewan Perancang Nasional dan
Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1958 - 1969*

Sebagai

Memori Kolektif Bangsa

(Register Nasional Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 400 Tahun 2023)

Atas Pengajuan Bersama

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dan
Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum**

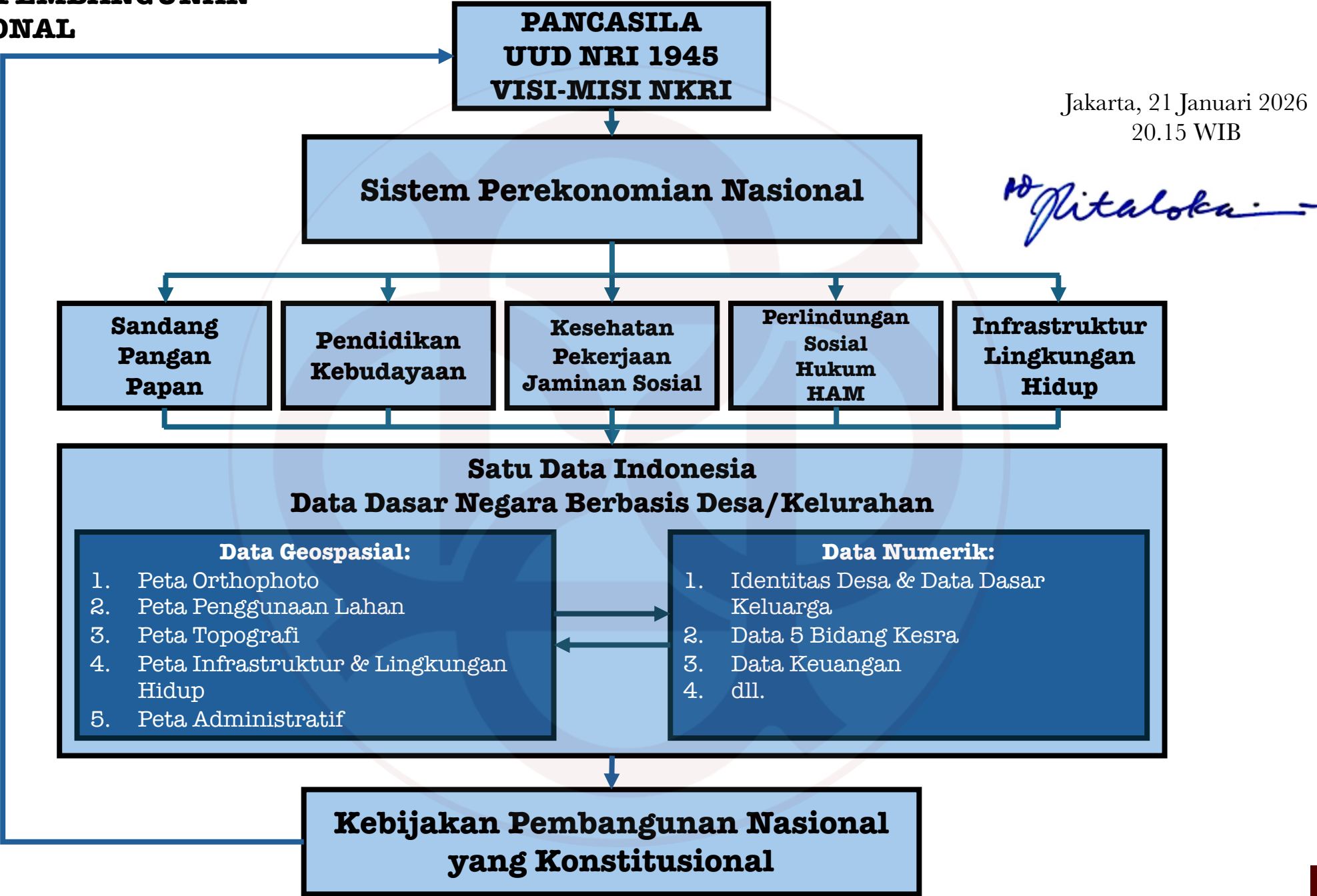


Tanggal ditetapkan

(17 November 2023)

Imam Gunarto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KONSTITUSIONAL

Jakarta, 21 Januari 2026
20.15 WIB

Pitaloka

Kebijakan Pembangunan Berbasis Satu Data Indonesia

1. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
2. Desentralisasi perspektif NKRI;
3. Demokrasi ekonomi pancasila;
4. Politik luar negeri bebas aktif dan defensif aktif (termasuk dalam kerja sama riset dengan negara lain);
5. *Evidence based policy*;
6. Pemberdayaan desa/kelurahan dalam *democratic rural development*;
7. Industrialisasi dengan menekankan pentingnya menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional, kearifan lokal, serta sumber daya alam hayati dan nir-hayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.





Wisma Indarung Padang, 30 Desember 2025
17.36 WIB

digitalokasi

Terima Kasih

Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum

Duta Arsip Nasional Republik Indonesia &
Dewan Pembina Majelis Transformasi Desa ICMI Pusat